

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia pada abad ke-21 dan menjadi salah satu industri yang mengglobal. Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara.

Kegiatan Pariwisata di Indonesia sudah dilakukan sejak jaman dulu atau lebih tepatnya ketika masa kerajaan. Para pejabat kerajaan diketahui sangat gemar berpetualang walaupun daerah yang bisa dikunjungi terbatas karena terbatasnya sarana dan prasarana pada waktu itu.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal¹.

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan

¹ "Rencana induk pembangunan kepariwisata nasional tahun 2010-2025". melalui

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka menuju integrasi ekonomi wilayah Asia Tenggara seperti yang tercantum dalam program *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, sektor pariwisata mulai diperhatikan secara serius oleh negara-negara ASEAN. Dimulai dengan adanya promosi melalui logo dan *tagline/slogan* pariwisata, Bentuk *tagline/slogan* tersebut yaitu, Brunei dengan *Brunei The Green Heart of Borneo*, Cambodia dengan *Cambodia Kingdom of Wonder*, Indonesia dengan *Wonderful Indonesia*, Laos dengan *Laos Simply Beautiful*, Malaysia dengan *Malaysia Truly Asia*, Myanmar dengan *Mystical Myanmar*, Philippines dengan *It's More Fun in The Philippines*, Singapore dengan *Your Singapore*, Thailand dengan *Amazing Thailand Always Amazes You*, Vietnam dengan *Vietnam Timeless Charm*, dan

ASEAN Tourism memiliki slogan *Southeast Asia, Feel The Warmth* yang menjadi mencitrakan seluruh pariwisata negara-negara anggota ASEAN, ini semua dibuat agar pariwisata di seluruh negara anggota ASEAN terlihat atraktif dan dapat menjadi pilihan para wisatawan internasional ².

Sejak didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ASEAN telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah serta membentuk kerja sama di berbagai bidang demi kepentingan bersama. Perkembangan internasional mendesak ASEAN untuk tetap sejalan, hingga mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Perkembangan inilah yang kemudian menjadikan negara-negara anggota ASEAN bersepakat pada pertemuan di Kuala Lumpur, 15 Desember 1997, untuk mengembangkan suatu komunitas kawasan yang terintegrasi kelak pada tahun 2020. Kemudian, seiring dengan perkembangan

²<http://itineraryku.blogspot.com/2012/01/asean-logo-dan-slogan-pariwisata-negara.html>).

dan kesiapan masing-masing negara, KTT ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan *Bali Concord II*, di mana para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Diputuskan juga bahwa kawasan ASEAN yang terintegrasi dipercepat dari 2020 menjadi 2015, bersamaan dengan Komunitas ASEAN 2015 setelah ditandatanganinya Deklarasi Cebu di Filipina.

Salah satu dari tiga pilar yang menopang Komunitas ASEAN yang terintegrasi adalah Komunitas Ekonomi ASEAN. Sektor pariwisata menjadi sektor pendukung dalam integrasi tersebut, mengingat besarnya peluang dan potensi pariwisata Asia Tenggara yang mampu bersaing dengan kawasan lain di dunia. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah pengunjung dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung ke negara-negara ASEAN mencapai 73 juta lebih di tahun 2010, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 63 juta orang. Selain itu, dari tahun 2005 hingga 2012 rata-rata pertumbuhan pariwisata ASEAN sekitar 8.3% per tahun, sedangkan pertumbuhan global hanya mencapai 3.6%.³

Untuk meningkatkan pariwisata ASEAN, para Menteri Pariwisata ASEAN berupaya meningkatkan industri pariwisata dengan dasar bahwa integrasi kawasan perlu ditopang dengan kerja sama pariwisata. Mereka memiliki satu pandangan bahwa upaya untuk meningkatkan pariwisata di negara masing-masing akan lebih efektif di bawah satu payung organisasi. Kerja sama pariwisata ASEAN dijalankan dengan kesadaran bersama bahwa untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi dan bebas hambatan dibutuhkan satu kerangka tersendiri yang kelak akan memayungi kepentingan masing-masing negara di sektor pariwisata. Hal ini penting mengingat di sisi lain mereka harus berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar ASEAN. Dalam konteks ini, ASEAN memiliki *Mutual*

³ Kompas 21 Agustus 2014 n 19

Recognition Arrangement (MRA) yang berisikan standar profesional pengelolaan pariwisata.⁴

Dalam konteks pariwisata, ASEAN memiliki sebuah mekanisme kerja sama yang disebut *ASEAN Tourism Forum* (ATF). ATF adalah forum kerja sama regional untuk mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisata internasional. ATF bertujuan: *pertama*, menjadikan ASEAN sebagai tujuan pariwisata yang tunggal; *kedua*, menciptakan dan meningkatkan kesadaran akan ASEAN sebagai kawasan tujuan turis yang kompetitif di Asia Pasifik; *ketiga*, menarik lebih banyak turis ke masing-masing negara anggota ASEAN atau kombinasi antarnegara; *keempat*, mempromosikan perjalanan turis internal ASEAN dan *kelima*, memperkuat kerja sama antarsektor dalam industri pariwisata ASEAN.⁵

Mengakui pentingnya pariwisata sebagai mesin ekonomi dan alat untuk pengembangan dan perubahan menjadi lebih baik dan terintegrasi, pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN atau ATF yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2011 menyepakati strategi khusus di bidang pariwisata yang kelak akan diterapkan oleh masing-masing negara, yakni *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* (ATSP). ATSP 2011-2015 mendorong peningkatan pariwisata di ASEAN sebagai acuan bagi *National Tourism Organizations* (NTOs) dalam menjalankan program-program pariwisata ASEAN. NTOs sendiri merupakan pertemuan para *senior officials* pariwisata yang biasanya diadakan setiap enam bulan sekali dalam rangkaian ATF.⁶

Dewasa ini, pariwisata tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang relatif

⁴ ASEAN, *ASEAN Tourism Ministers Meeting (online)*, <<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/overview-19>>, diakses 26 September 2013.

⁵ *ASEAN Document Series 2006*, ASEAN Sekretariat, Jakarta, 2007, p. 77.

⁶ Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. *ASEAN Selang Pandang*. edisi ke-19.

kaya, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia . Terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, Pariwisata bahkan telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia, yang ditandai antara lain dengan perkembangan jumlah kunjungan turis dan pendapatan yang di peroleh dari turis internasional . Berdasarkan laporan *World Tourism Organization* (WTO) , total kunjungan turis di seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir mencapai 1 miliaran orang per tahun. Dalam 2007.⁷

Selain itu, ada beberapa hal yang di bentuk oleh ASEAN untuk memajukan pariwisatanya dalam kesiapan menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015. Diantaranya *ASEAN Common Visa* yaitu, pengaturan kerjasama bebas visa bagi pemegang paspor biasa atau paspor hijau, perjanjian bebas visa ini penting untuk meningkatkan hubungan antar warga dan merupakan bagian dari konektivitas ASEAN. Meningkatkan standar profesional pariwisata, meningkatkan standar produk pariwisata. Meningkatkan kerjasama dengan negara lain, terutama dengan negara mitra ASEAN seperti China, Jepang, Korea Selatan dan India.

Untuk itu, ASEAN melalui *ASEAN Tourism Forum* (ATF) yang merupakan kegiatan pariwisata untuk meningkatkan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. ATF dibentuk pada tahun 1981, ATF diadakan setiap tahunnya secara bergilir oleh negara anggota ASEAN berdasarkan urutan alfabetik diantara sepuluh negara anggota ASEAN. ATF merupakan *event* pariwisata tahunan terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang secara umum ATF bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai tujuan wisata yang atraktif, memperkuat kerjasama antar sektor

⁷ StafPusatKebijakanEkonomiMakro.Badan KebijakanFiskal.KementerianKeuanganEmail

dalam industri turis ASEAN, secara khusus ATF juga menyediakan konvensi tahunan industri pariwisata ASEAN yang bertujuan sebagai wadah tukar ide, untuk meninjau pembangunan industri pariwisata dan secara bersama-sama memformulasikan rekomendasi yang spesifik⁸, untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata ASEAN dan menjadi wadah bagi para pelaku bisnis industri pariwisata, yaitu penjual yang berasal dari negara anggota ASEAN dan pembeli yang berasal dari seluruh dunia. Dalam kegiatan ATF juga hadir para jurnalis dari seluruh dunia untuk meliput kegiatan ATF.⁹

Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang mempunyai berbagai macam objek wisata dan kebudayaan yang cukup menarik dan bervariasi, baik itu objek wisata yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan terutama pulau Bali. Namun walaupun Indonesia memiliki lebih banyak objek wisata, khususnya wisata alam, di Asia Tenggara, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-4 di bidang pariwisata. Posisi pertama diduduki oleh Malaysia, kedua oleh Singapura dan ketiga oleh Thailand hal ini merupakan bukti dari ketertinggalan Indonesia sebagai negara yang memiliki objek pariwisata alam yang begitu beragam dan luas namun masih tertinggal oleh negara tetangga objek pariwisata alamnya jauh lebih sedikit (ASEAN,2012:5).

Pariwisata Indonesia hanya mampu berada di peringkat ke-4 ASEAN, Malaysia, Singapura dan Thailand masih unggul di antara negara-negara ASEAN lain dalam sektor wisata, demikian dinyatakan dalam Laporan Tahunan ASEAN

⁸ (ASEAN, 2002:2).

⁹ Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, edisi ke-19, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2010, p. 120

Bidang Pariwisata 2012. Pemberian peringkat didasarkan pada penilaian yang mencakup beberapa faktor yaitu kebijakan dan peraturan negara bersangkutan, pelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan kebersihan, prioritas pariwisata, infrastruktur transportasi udara, infrastruktur transportasi darat, infrastruktur pariwisata, infrastruktur Informasi dan teknologi (ICT), daya saing harga, sumber daya manusia, afinitas untuk sektor pariwisata, sumber daya alam dan sumber daya budaya. Negara ASEAN lain seperti Brunei Darussalam, Indonesia, dan Vietnam dikategorikan sebagai negara yang memiliki potensi di bidang wisata, namun masih memiliki berbagai kelemahan. Sementara itu, Filipina dan Kamboja dikategorikan sebagai negara ASEAN yang memiliki banyak kelemahan di sektor ini (Diakses pada 28 Agustus 2014).¹⁰

Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh keadaan industri pariwisata Indonesia. Dalam Undang-Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009 industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Di dalam Industri Pariwisata terdapat elemen-elemen, yaitu akomodasi (hotel, restoran, dll), transportasi, obyek wisata, biro perjalanan wisata, kerajinan tangan, dan faktor pendukung lainnya.¹¹

Thailand yang memiliki letak di tengah kawasan Asia Tenggara, Thailand dikatakan jantung dari Asia Tenggara. Dari letak geografisnya, Thailand memiliki

¹⁰ <http://www.suarapembaruan.com/home/ukuran-asean-pariwisata-indonesia-tak-dianggap-memalukan/20716>).

¹¹ (Suwanto, 1997: 41).

banyak batas alam dengan negara-negara tetangga: perbatasan pegunungan dengan Myanmar (Burma) di utara dan barat, bentangan panjang Sungai Mekong yang memisahkan Thailand dari Laos di utara dan timur, dan Sungai Mekong dan Pegunungan Dongrak menggambarkan perbatasan Kamboja di timur. Seluas sekitar 514.000 kilometer persegi (200.000 mil persegi), Thailand adalah negara ke-50 terbesar di dunia.¹²

Dalam kegiatan pariwisata pasti akan memberikan dampak bagi setiap kalangan yang berkecimpung di dalam pariwisata. Seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi yang berkecimpung di dalam kegiatan pariwisata ini baik dari objek wisatanya, masyarakat sekitar maupun pemerintah daerahnya. Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata.¹³

Dampak positif dari pariwisata :

1. Pendapatan Tetap

Pariwisata dapat mendatangkan pendapatan tetap yang efeknya dapat berantai. Salah satunya adalah terciptanya lapangan kerja untuk penduduk setempat. Selain itu, masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan melalui pengeluaran oleh wisatawan misalnya cinderamata, makanan-minuman, penginapan, atau jasa pariwisata yang lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa

¹² *Tourism Thailand* dalam <http://www.tourismthailand.org/Thailand/geography> diakses pada tanggal

27 april 2014

¹³ <http://anakulibali.blogspot.co.id/2014/01/dampak-positif-dan-negati-pariwisata.html>

masyarakat tidak bisa sepenuhnya menggantungkan pendapatan mereka dari pariwisata. Pariwisata kondisinya sangat berfluktuatif tergantung dari banyak hal diantaranya kondisi ekonomi dan faktor keamanan serta kenyamanan. Banyak pekerjaan di sektor pariwisata juga merupakan pekerjaan paruh waktu ataupun musiman, misalnya pemandu wisata akan ada pekerjaan jika ada wisatawan.

2.Peningkatan Pelayanan Untuk Masyarakat

Adanya sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata baik di dalam maupun luar kawasan lindung dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat akan mampu mengakses pelayanan kesehatan maupun pendidikan dengan lebih baik. Selain itu penerapan pajak ataupun insentif dapat juga membantu proyek-proyek pembangunan di masyarakat. Pajak dapat diperoleh dari iuran masuk kawasan ataupun konsesi penggunaan kawasan. Proyek-proyek masyarakat dapat didanai dari kegiatan pariwisata berkelanjutan ini seperti mendanai program sekolah yang sedang berjalan ataupun pembangunan klinik kesehatan baru.¹⁴

3.Penguatan dan Pertukaran Budaya

Interaksi dengan masyarakat lokal serta tradisi dan budayanya merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi wisatawan, inilah salah satu alasan mereka berwisata. Begitupun sebaliknya bagi masyarakat lokal, dapat membangun rasa percaya diri serta bangga terhadap kebudayaan mereka karena tradisi dan

¹⁴ *Ibid*

budayanya disukai oleh wisatawan. Peran dan interaksi masyarakat lokal terhadap wisata dan wisatawan merupakan nilai tambah bagi pariwisata. Namun, kesuksesan dari proses interaktif ini tergantung kepada masyarakat lokal juga, bagaimana mereka mengolah proses serta situasi yang ada. Kemahiran berbahasa (untuk wisatawan asing) serta keramahan dan kehangatan sikap masyarakat lokal menjadi hal penting untuk upaya ini.

4.Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi

Sudah menjadi hal umum jika kita biasanya kurang mensyukuri dan menghargai lingkungan sekitar kita. Hal ini dapat disebabkan karena tiap saat kita hidup didalamnya sehingga kurang bisa melihat keindahan, keunikan dan nikmat yang ada. Meskipun pada dasarnya kita dapat memahami kerumitan alam dan peran sumber daya yang ada di sekitar kita. Ketika orang luar datang dan mengagumi lingkungan, budaya serta tradisi kita maka akan timbul rasa bangga pada apa yang kita miliki dan biasanya akan diikuti dengan upaya konservasi. Banyak dari kita kemudian berusaha untuk melindungi daerah kita serta mengubah pola hidup yang dapat merusak lingkungan, misalnya kita akan menjaga kebersihan lingkungan, mengelola kualitas air serta mempelajari budaya dan tradisi kita.¹⁵

¹⁵ Ibid

Dampak negatif dari Pariwisata :

1.Rusaknya Lingkungan

Berasal dari jumlah dan perilaku wisatawan yang dapat mengganggu dan merusak kondisi lingkungan setempat. Berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan dan dapat dikontrol dengan pemberlakuan manajemen pariwisata yang baik dengan menerapkan batasan perubahan yang dapat diterima. Proses yang dipakai adalah adaptif aktif. Selalu dapat melihat setiap perubahan yang terjadi dengan menetapkan kriteria serta indikator yang disesuaikan dengan tujuan paradigma pariwisata yang dibangun.

2.Ketidak stabilan Ekonomi

Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap kondisi pariwisata yang fluktuatif,Sebagai konsekuensinya, wisatawan dan masyarakat lokal dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelayanan, makanan-minuman, bahan bakar, penginapan dll.

3.Kepadatan dan Kenyamanan

Terlalu banyaknya wisatawan akan mengganggu kenyamanan wisatawan itu sendiri dan juga masyarakat yang hidup di daerah tersebut, terutama jika hal ini terjadi di kawasan lindung.¹⁶

¹⁶ Ibid

4.Pembangunan Berlebih

Pembangunan pariwisata jika tidak dikontrol dengan baik dapat mengganggu kenyamanan dan merusak lingkungan. Pembangunan dalam hal ini bisa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembangunan yang terencana dan pembangunan yang tidak terencana. Pembangunan terencana misalnya resort, hotel, dermaga, akses jalan dan fasilitas pendukung wisata lainnya. Mereka sudah menempati ruang dan jumlah tertentu. Pembangunan yang tidak terencana misalnya rumah-rumah pekerja industri wisata. Pembangunan tidak terencana biasanya disebabkan oleh masyarakat yang mencari pekerjaan di sektor wisata. Pembangunan ini seringkali sewenang-wenang, tidak memperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungan Sehingga kerap muncul gubuk-gubuk kumuh dan liar di sekitar lokasi wisata.

5.Pengaturan Dari Pihak Luar Yang Berlebihan

Meskipun hal ini terlihat sebagai penilaian subjektif tapi hal ini juga telah menjadi pusat perhatian para pemerhati kegiatan pariwisata. Pengusaha luar biasanya mempunyai pengalaman serta sumber pendanaan yang lebih banyak. Seringkali dengan pengalaman, pengetahuan serta kekuatan yang mereka miliki timbul kecenderungan bahwa mereka akan mengatur kegiatan pariwisata dan dapat menekan orang lokal atau menimbulkan kesan seolah-olah orang lokal hanya sebagai peran pembantu saja. Hal ini akan berdampak tidak baik bagi kegiatan pariwisata itu sendiri karena kegiatan pariwisata ini dapat dibenci dan tidak didukung orang lokal. Diperlukan komunikasi yang baik dan pemerintah

¹⁷mempunyai peran besar terhadap manajemen pariwisata di suatu kawasan lindung.

6.Kebocoran Secara Ekonomi

Pajak dari sektor pariwisata dapat “bocor” ke tempat atau daerah lain jika wisatawan lebih memilih membeli barang ataupun memakai jasa-usaha yang dikelola oleh orang luar (non lokal). Sebenarnya hal ini lumrah dan biasa terjadi di berbagai tempat wisata dan kita juga tidak bisa menghindarinya. Hal yang perlu dipikirkan kembali adalah membatasi kebocoran yang terjadi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Untungnya, banyak wisatawan yang semakin sadar untuk membeli dan memakai produk lokal jika mereka diberi kesempatan dengan catatan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan dapat bersaing dan bermutu bagus.

7.Perubahan Budaya

Perubahan budaya yang terjadi di masyarakat dapat bersifat positif dan negatif, tergantung dari mana kita memandangnya. Bagaimanapun masyarakat biasanya tidak mampu atau tidak diberi kesempatan untuk menentukan apakah mereka ingin berubah atau tidak. Perubahan akan terjadi dengan begitu saja tanpa masyarakat menyadarinya. Bagi para wisatawan, ada yang mengharapkan agar masyarakat tidak berubah tetapi bagi sebagian wisatawan yang lain masyarakat merupakan target perubahan untuk dipengaruhi. Dilihat dari masyarakat itu sendiri juga ada beberapa perspektif. Ada masyarakat yang ingin menuju ke arah modernisasi, ada masyarakat yang ingin mempertahankan gaya hidup serta

¹⁷ <http://anakulibali.blogspot.co.id/2014/01/dampak-positif-dan-negati-pariwisata.html>

budaya mereka tetapi ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan perubahan yang terjadi selama mereka dapat hidup layak.¹⁸

Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil judul **“PERANAN ASEAN MELALUI ASEAN TOURISM FORUM (ATF) DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA .”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

- A. Apa saja program ASEAN melalui ATF yang mendukung Industri Pariwisata di Kawasan ASEAN ?
- B. Bagaimana kendala kerjasama dalam *ASEAN Tourism Forum* di Indonesia ?
- C. Bagaimana peran *ASEAN Tourism Forum* dalam peningkatan pariwisata Indonesia?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Luasnya Permasalahan di atas , Penulis membatasi pada Peranan Asean melalui Asean Tourism Forum (ATF) dalam meningkatkan Industri Pariwisata Indonesia.

1.2.2. Rumusan Masalah

¹⁸ Ibid

Guna Memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah masalah yang menunjukkan “Bagaimana peranan Asean melalui Asean Tourism Forum (ATF) dalam meningkatkan Industri Pariwisata Indonesia tahun ?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Selain tujuan–tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini pun memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui Program ATF yang mendukung industri di Sektor Pariwisata ASEAN
- B. Untuk mengetahui tentang kendala kerjasama dalam *ASEAN Tourism Forum* di Indonesia
- C. Untuk mengetahui Peran *ASEAN TOURISM FORUM* dalam meningkatkan Pariwisata Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Dari Segi Akademis , Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pengkaji Masalah – masalah internasional dalam mengkaji Ekonomi – Pariwisata , Khususnya **PERANAN ASEAN MELALUI ASEAN TOURISM FORUM (ATF) DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA.**

- b. Dari segi Pragmatis , Penelitian sebagai bahan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan , terutama Potensi Sektor – Sektor Pariwisata di Indonesia .
- c. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur ataupun sistematis. Dengan kata lain, teori akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Dalam ilmu sosial manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang melakukan aktifitas kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kegiatan berinteraksi sosial ini adalah bentuk umum dan syarat utama terjadinya proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang

menyangkut hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, atau antar kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok¹⁹.

Hubungan sosial tersebut kemudian meluas sehingga membentuk suatu sistem yang dinamakan negara, berkembang melewati batas antar negara, sehingga pada akhirnya membentuk suatu sistem global yang disebut dengan sistem internasional (*international system*).

Fenomena ini lalu diamati dan dipelajari oleh penstudi hubungan dan memunculkan studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional terdiri atas paradigma-paradigma yang muncul atas fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan hubungan internasional itu sendiri.

Hubungan Internasional secara sempit dipaparkan oleh **Robert Jackson** dan **Georg Sorensen**²⁰ sebagai hubungan timbal balik antar semua unsur dalam satu negara lain, pada tahap awalnya tanpa harus terkait langsung dengan konteks kekuasaan atau power dan negara dan konteks trias politiknya²¹.

Dan definisi menurut **Suwardi Wiriaatmadja**, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang dikutip dari Tryge Matheisen, yaitu Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dan politik internasional²². Selain itu Suwardi

¹⁹ C. A. Mcleland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*, Terj: Mien Joebnacer, PT. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 27

²⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen adalah penulis buku *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*

²¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 1-28

²² Suwardi Wiriaatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta, 1967) hal. 1

Wiriatmadja pun memaparkan pengertian Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Hubungan Internasional: mencakup segala bidang hubungan antar bangsa-bangsa dan kelompok masyarakat dunia dan kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara bertindak, cara berpikir manusia, dalam masyarakat dunia²³”

Selain itu, **Norman D. Palmer** dan **Howard C. Perkins**, dalam bukunya *Methodology in the Study of International Relation*, memaparkan:

“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala interaksi di antara negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negaranya. Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa atau negara saja tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain. Interaksi yang terjadi antara negara-negara beserta dengan segala aspek-aspeknya merupakan sebuah hakekat dari Hubungan Internasional”²⁴

Sebagai tambahan, dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer, **Teuku May Rudy** dalam bukunya *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah Global: Isu, Konsep Teori dan Paradigma*, menjelaskan bahwa:

²³ *Ibid.*

²⁴ Norman D. Palmer dan Howard C. Perkins, *Methodology in the Study of International Relation* (New York, USA: Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1986) hal. 14

“Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai “high politic”. Sedangkan Hubungan Internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkungannya melintasi batas-batas negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (non-state actors)”²⁵.

Suatu negara akan berinteraksi dengan negara lain dalam mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan internasional, sedangkan bentuk interaksi dari hubungan yang dilaksanakan telah ditetapkan oleh masing-masing negara di dalam kebijaksanaan politik luar negerinya. Perihal tersebut, maka **Mochtar Kusumaatmadja** berpendapat:

“Politik luar negeri pada hakekatnya alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri, merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri, merupakan aspek pola dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang”.

²⁵ Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

Dengan demikian Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi lintas nasional yang terjadi antar negara tidak hanya terbatas pada hubungan resmi negara-negara saja, melainkan juga bisa dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang berasal dari pihak non-state. Kemudian bahwa ruang lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional menjadi lebih luas mencakup semua aspek kehidupan suatu negara (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Serta salah satu aspek Hubungan Internasional adalah kajian tentang interaksi dan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya serta berusaha mempelajari pengaruhnya terhadap kondisi internal dalam negara tersebut.

Interaksi dalam pergaulan internasional tersebut menciptakan suatu kerjasama antara suatu negara dengan negara lain atau beberapa negara dengan negara lain disebut dengan kerjasama internasional. Konsep kerjasama internasional menurut **K. J. Holsti** yaitu:

“Sebagai transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi,

mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak”²⁶.

Dengan adanya saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain dalam memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya, maka memerlukan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Adapun pemahaman mengenai kerjasama internasional, menurut **Koesnadi Kartasasmita** dalam bukunya *Organisasi dan Administrasi Internasional*, adalah sebagai berikut:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama; keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama

²⁶ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 26.

diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”²⁷.

Arah dan tujuan kerjasama internasional tersebut tentunya diharapkan bisa saling menguntungkan, dalam hal ini kerjasama internasional senantiasa membawa dampak pada struktur perekonomian suatu negara. Sehingga diperlukan suatu mekanisme ekonomi internasional yang jelas untuk mendukung potensi pengembangan ekonomi nasional.

Kerjasama internasional dalam aplikasinya dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut²⁸:

- 1. Kerjasama Intra-Regional; merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan (region), seperti di Asia Tenggara yaitu ASEAN, di Timur Tengah yaitu Liga Arab, di Amerika Utara yaitu NAFTA dan Trans Atlantik yaitu North Atlantic Treaty Organization (NATO).**
- 2. Kerjasama Inter-Regional; merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan diantara negara-negara di kawasan lain, seperti kerjasama antara Eropa dengan Jepang.**

²⁷ Koesnadi Kartasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Bandung: FISIP UNPAD Press, 1983), hlm. 83.

²⁸ Teuku May Rudy, *Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, (Bandung: Bina Budhayana, 1997), hlm. 24.

3. Kerjasama Multilateral dan Bilateral; kerjasama multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, sedangkan kerjasama bilateral adalah kerjasama yang hanya dua negara.

Berdasarkan pandangan diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional di bidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari peran faktor gabungan ekonomi politik internasional. Dimana dalam kerjasamanya begitu kompleks, suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya, kebijakan ekonomi suatu negara dalam konteks interaksi internasionalnya tidak akan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politiknya. Lebih jauh lagi, **Mochtar Mas-oed** dalam bukunya *Ekonomi Politik – Politik Internasional dan Pembangunan*, mendefinisikan Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:

“...tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “Negara” dan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat...ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi”²⁹.

²⁹ Mochtar Mas'oed, *Ekonomi – Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2003), hlm. 4.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh **R. E. A. Ma'moer** dalam bukunya *Ekonomi Internasional*, bahwa tujuan ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

“...tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama bantu membantu antara bangsa-bangsa atau negara-negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tak terpenuhi persediaan di dalam negeri dapat terpenuhi oleh negara lain ...³⁰.

Dari adanya daya saing ketergantungan antara instrumen ekonomi dan politik dalam area internasional, hubungan tersebut berkembang menjadi Ekonomi Politik Internasional (EPI). **Robert Giplin** dalam bukunya *The Political Economy of International Relations*, bahwa:

“Pada dasarnya terdapat tiga unsur penting dalam ekonomi politik internasional. Pertama, penyebab dan hal-hal yang mempengaruhi kebangkitan pasar. Kedua, hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan

³⁰ R. E. A. Ma'moer, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1974), hlm. 1.

politik. Ketiga, signifikansi ekonomi pasar dunia terhadap ekonomi domestik”³¹.

Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara Ekonomi Internasional dan Politik Internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional. Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan juga sebagai dinamika interaksi global antara politik dan ekonomi, yaitu antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi).

Menurut Hunziger dan Krapf dari Swiss dalam *Grundriss Der Allgemeinen Fernverkehrslehre*

“ menyatakan pariwisata adalah keserluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat dengan syarat orang tersebut tidak melakukan suatu pekerjaan yang penting (Major Activity) yang memberi keuntungan yang bersifat permanent maupun sementara.”³²

pada dasarnya pariwisata itu motif kegiatannya adalah untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, bersantai, studi, kegiatan Agama, dan mungkin untuk kegiatan olahraga. Selain itu semua kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan bagi pelakunya baik secara fisik maupun psikis baik sementara maupun dalam jangka waktu lama.

³¹ Robert Giplin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: University Press, 1987), hlm. 27.

³² <http://wiranata-wira.blogspot.co.id/2009/12/pariwisata-menurut-para-ahli.html>

Mengukur manfaat dan kerugian pembangunan pariwisata pada beberapa negara saat ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli ekonomi khususnya yang telah melakukan riset dan evaluasi terhadap ekonomi pariwisata. Beberapa pandangan para pakar mewarnai pembahasan paper ini dari sudut pandangan yang berbeda-beda.

“Frechtling (1987) considers alternative methods of collecting data about expenditure by tourists and the shortcomings of these. He also reviews methods such as impact multipliers and input-output analysis used to measure the economic impacts generated by tourism expenditure”³³

Frechtling (1987), menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu Negara harus tersedia data yang cukup lengkap, Dia menawarkan metode alternative khususnya berhubungan dengan metode pengumpulan data tentang pengeluaran wisatawan di saat yang akan datang, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sector pariwisata.

³³ Board, J., Sinclair, T. and Sutcliffe, C. (1987) “A Portfolio Approach to Regional Tourism”, *Built Environment*, **13**(2), 124-137.

Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan pendapatnya bawa “ perjanjian internasional merupakan perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu.”

G.Schwarzenberger mengatakan bahwa “ perjanjian internasional adalah suatu persetujuan subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hokum internasional”.

Oppen-Helmer Luterpact menyatakan bahwa” perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antar negra yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya.”³⁴

Perjanjian Internasional membut para aktor negara dan aktor non negara memiliki kewajiban dan hak terhadap perjanjian perjanjian yang telah di adakan oleh pelaku state dan non state .

Dari kerangka teoritis diatas, maka penulis mendapatkan beberapa asumsi, yaitu :

1. Adanya kerjasama internasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi Negara-negara yang bersangkutan. Adanya desakan dari kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Seperti Pariwisata dengan Kerjasama Internasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing untuk menaikkan ekonomi internasional.

³⁴ <http://www.artikelsiana.com>

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan Asumsi dan kerangka teoritis di atas , maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : **“Kerjasama Ekonomi ASEAN dalam sektor Pariwisata melalui ASEAN TOURISM FORUM dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia”**

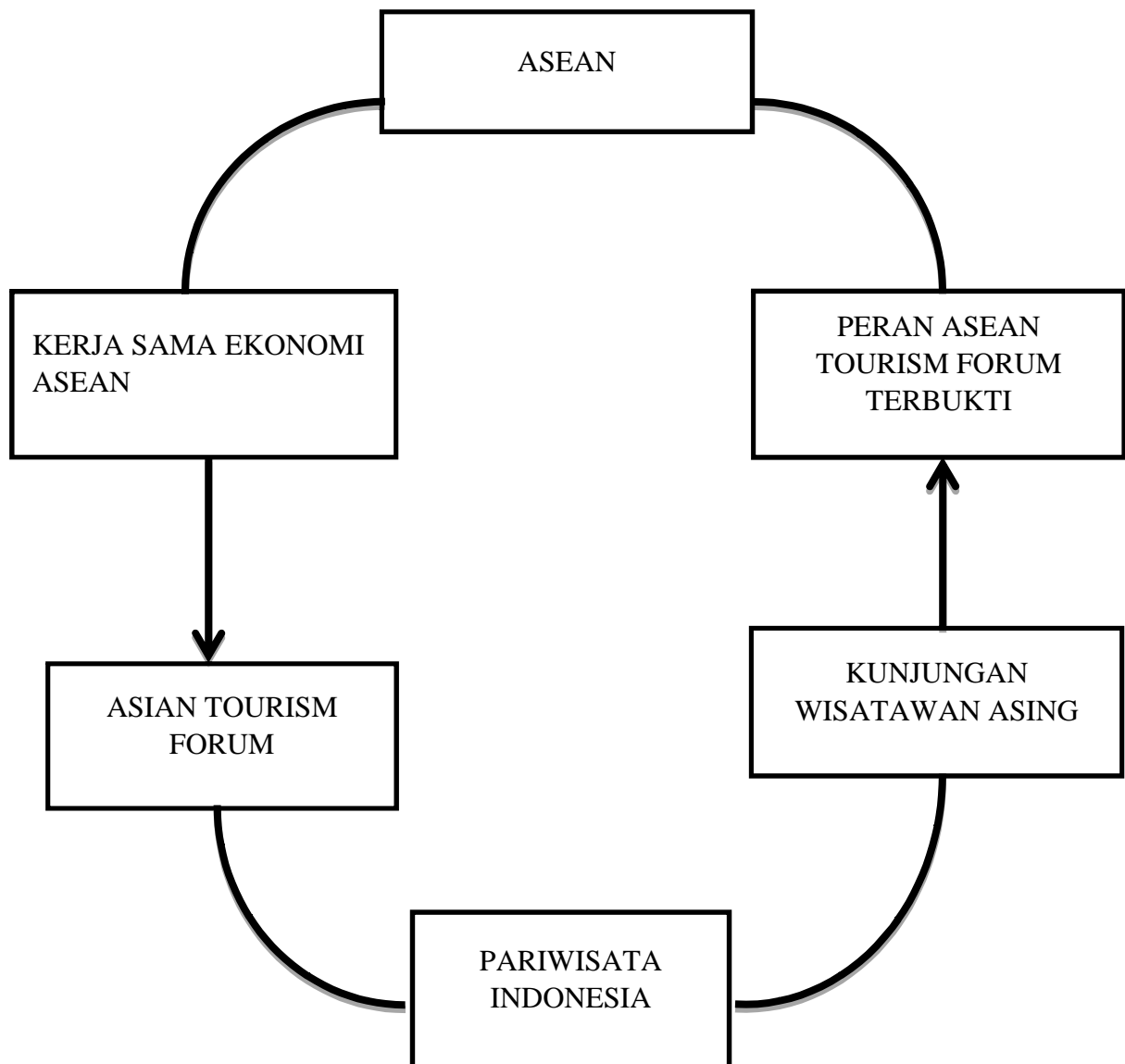
1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Kerjasama Ekonomi ASEAN dalam sektor Pariwisata melalui ASEAN TOURISM FORUM	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan ATF itu dirancang dan ditargetkan memiliki dampak sosial ekonomi yang luas bukan saja bagi pelaku wisata tetapi masyarakat. ATF juga menyediakan 	<ol style="list-style-type: none"> http://www.kompasiana.com/losnito/asean-tourism-forum-atf-9-15-januari-2012-di-manado-untuk-siapa_550ad3ae813311e078b1e3fa http://naked-traveler.com/2016/01/13/asean-tourism-forum-2016/

	<p>tempat untuk menjual dan membeli produk pariwisata regional dan individu negara anggota ASEAN melalui TRAVEX (<i>Travel Exhibition</i>)</p>	3.
<p>Variabel Terikat: dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia”</p>	<p>1. Indonesia Memiliki Letak geografis yang sangat strategis , karena memiliki SDA yang melimpah.</p> <p>2. Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global di</p>	<p>1. https://www.academia.edu/6489034/PERDESAAN_GEOPOLITIK_and_GEOSTRATEGI_PEMBANGUNAN_PARIWISATA_INDONESIA_KE_DEPAN</p> <p>2. http://www.jakartajive.com/2012/01/m-atm-3-ke-11.html</p>

	<p>beberapa pasar utama, para Menteri mencatat bahwa kedatangan wisatawan internasional di negara-negara ASEAN Plus Tiga pada tahun 2011 tetap tinggi dengan lebih dari 70,1 juta wisatawan dan pertumbuhan 12.64 persen dibandingkan dengan tahun 2010.</p>	
--	--	--

1.4.4 SKEMA KERANGKA TEORITIS



1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Tingkat Analisis

Tingkat penelitian dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memilah masalah yang akan di analisis induksionis . Analisa ini yang mempunyai unit analisisnya (unit yang di anggap sebagai variabel independen) pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada penelitian ini penulis menempatkan Peranan ASEAN melalui ASEAN TOURISM FORUM (ATF) sebagai variable bebas dan unit eksplanasinya serta dapat meningkatkan industri pariwisata di Indonesia sebagai variable terikat dan unit analisisnya.

1.5.2 Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis mencoba menggambarkan masalah yang muncul secara sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama mengenai eksistensi bahasa di dalam sistem hubungan internasional. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa,

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan³⁵.

2. Metode Historis: Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena –fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada, dikarenakan tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak negara terkait yang sedang dibahas, karena keterbatasan dana. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data dari website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

1.5.4 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian dikerjakan selama 6 bulan sesuai dengan *deadline* yang diberikan pihak kampus, terhitung sejak 21 Maret 2016 hingga 21 September 2016. Untuk memberikan hasil penelitian yang maksimal, penulis mengunjungi beberapa tempat sebagai sumber data, untuk menunjang data yang diperlukan, seperti:

- a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

³⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988) hlm. Bab II

Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Tlp. (022) 4205945 – 4262456 / Fax. (022) 4205945 – 4210656

Website: <http://fisip.unpas.ac.id/>

b. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan

Gedung 9 Lantai 2 & 3

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

Tlp. (022) 2032655 ext / voip. 190202

E-mail: perpust@unpar.ac.id

c. Badan Perpustakaan Daerah Jawa Barat

Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Bandung, Jawa Tengah 40285

Website: <http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan>

1.5.5 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.
- BAB II** Merupakan pembahasan variabel bebas terkait ASEAN dan ASEAN Tourism Forum
- BAB III** Merupakan pembahasan variabel terikat terkait kondisi pariwisata di Indonesia

- BAB IV Merupakan verifikasi data seputar ASEAN Tourism Forum dalam
Meningkatan Pariwisata di Indonesia
- BAB V Merupakan kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan
BAB IV.

